

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SALES GROWTH* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Sella Anggining Putri¹, Ni Putu Eka Widiastuti², Panubut Simorangkir³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹sella.anggining@upnvj.ac.id

²putueka@upnvj.ac.id

³panubut.simorangkir@upnvj.ac.id

Abstrak

Sasaran utama penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek penelitian ini berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, dengan total sampel sebanyak 129 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji pemilihan estimasi data panel, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel *sales growth* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, variabel kontrol yakni profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: kompetensi dewan komisaris; kompetensi komite audit; kepemilikan institusional; *sales growth*; profitabilitas; ukuran perusahaan; *tax avoidance*.

Abstract

The main objective of this study is to analyze the effect of the competence of the board of commissioners, the competence of audit committee, institutional ownership, and sales growth on tax avoidance with profitability and firm size as a controlling variable. The object of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 period, with a total sample of 129 companies. This research uses quantitative methods using panel data. The data analysis technique used is the classical assumption test, panel data estimation selection test, multiple linear regression test, and hypothesis testing using a significance of 5%. The result of this study state that the sales growth variable has a negative significant effect on tax avoidance, while the competence of the board of commissioners, the competence of audit committee, institutional ownership has no effect on tax avoidance. In addition, control variable namely profitability has a positive significant effect on tax avoidance and firm size has a negative significant effect on tax avoidance.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

Keywords: *the competence of the board of commissioners; the competence of audit committee; institutional ownership; sales growth; profitability; size; and tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Indonesia yang menjadi negara berkembang masih banyak yang harus dikerjakan dalam pembangunan di berbagai sektor. Sumber pembiayaan pembangunan Indonesia sebagian besar didasarkan dari pendapatan pajak. Berlandaskan UU RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah pemberian wajib yang diserahkan pada negara yang terutang oleh individu maupun badan selaku wajib pajak yang sifatnya memaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Untuk menambah penerimaan yang dihasilkan dari sektor pajak, pemerintah dengan segala upaya mendorong wajib pajak dalam melakukan perpajakannya secara tepat waktu dan tidak memaksa.

Pajak yang menjadi sumber pendanaan pada APBN sendiri merupakan unsur penting yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk membiayai keperluan pemerintah dalam menjalankan kegiatan negara demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pendapatan nasional. Namun, dalam menjalankan upaya tersebut terdapat beberapa masalah yang disebabkan akibat banyaknya wajib pajak yang kurang patuh termasuk wajib pajak badan usaha yang berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah membutuhkan dana untuk menjalankan perekonomian negaranya yang kebanyakan dihasilkan atas penerimaan pajak. Di sisi lain, wajib pajak selalu berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya sekecil-kecilnya. Sebab, melunasi pajak dipandang menyusutkan kapasitas ekonomisnya. Terdapat beda kepentingan menyebabkan wajib pajak meminimalkan pembayaran pajaknya yang memungkinkan adanya peluang melaksanakan penghindaran pajak (Permata et al., 2018).

Penghindaran pajak adalah cara untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak bersifat legal menurut hukum yang masih ada dalam bingkai ketetapan perpajakannya. Penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya ketetapan tertulis dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan regulasi perpajakan. Ketentuan ini dianggap tidak bertentangan dan tidak melanggar hukum yang berlaku (Pohan & Anwar, 2016).

Tabel 1. Presentase Capaian Penerimaan Pajak Di Indonesia
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	Rp. 1.294,26	Rp. 1.355,20	Rp. 1.283,56	Rp. 1424,00	Rp. 1.577,56
Realisasi	Rp. 1.060,83	Rp. 1.105,81	Rp. 1.151,13	Rp. 1315,51	Rp. 1332,06
Capaian	82%	82%	90%	92%	84%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1 presentase capaian penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 tidak signifikan naik maupun turun. Persentase pencapaian dari setiap tahunnya belum mencukupi sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dapat dilihat pada tahun 2019 pencapaian menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,99%.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak 2019 yaitu karena terlalu memanfaatkan adanya kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance*. Faktor lainnya yaitu terdapat di beberapa sektor pajak yang melakukan penundaan dalam pemungutan pajak. Dan faktor yang terakhir karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Hal ini membutuhkan peran pemerintah yang lebih tegas dalam menentukan kebijakan pemungutan pajak yang disiplin tepat waktu dan tanpa paksaan.

Fenomena penghindaran pajak bukan hal baru yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan yang melaksanakan upaya aktivitas penghindaran pajak ialah Raksasa rokok dunia, British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Dialansir dalam laman berita Kontan.co.id (2019) Menurut TJN menyebutkan adanya pelaksanaan *tax avoidance* oleh BAT menyebabkan kerugian sampai US\$ 13,7 juta per tahun. Agar terlepas dari kewajiban perpajakannya, BAT menggunakan dua cara untuk memindahkan setengah penghasilannya tidak masuk ke Indonesia. Hal pertama yaitu Bantoel melakukan utang pada perusahaan afiliasi di Belanda (*Rothmas Far East BV*) sebanyak Rp 5,3 triliun pada tahun 2013 dan Rp 6,7 triliun tahun 2015. Bantoel sengaja memilih Belanda untuk melakukan pinjaman karena dianggap memiliki perjanjian bebas pajak terkait pembayaran bunga utang sehingga Indonesia rugi sampai dengan US\$ 11 juta per tahun. Cara kedua yaitu Bantoel melakukan penyeteroran kembali ke Inggris sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Kecurigaan otoritas bursa atas kinerja perusahaan rokok ini sudah cukup tinggi. Pada 2018, kerugian RMBA sebesar Rp 608,46 miliar dan kerugian membengkak 26,74% dibanding 2017 yang memperoleh Rp 480,06 miliar. Sementara, penghasilan dari penjualan terus bertambah pada setiap tahunnya.

Tindakan penghindaran pajak biasa dilakukan oleh aktivitas manajer perusahaan yang beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Penerapan *corporate governance* (CG) sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas suatu perusahaan. Dilansir dalam laman berita CNNIndonesia.com (2017) menuturkan kini implementasi *good corporate governance* (GCG) di Indonesia cukup ketinggalan dibanding negara-negara ASEAN. Membangun fundamental dalam sebuah perusahaan ialah bagian utama dalam menerapkan GCG yang lebih baik. Apabila sebuah perusahaan sudah menerapkan *corporate governance* akan menghasilkan kinerja yang efisien dan juga stakeholder akan mendapatkan perlindungan yang baik.

Mekanisme dalam pengendalian GCG dibedakan menjadi 2 yakni mekanisme internal dan eksternal perusahaan. Mekanisme internal perusahaan ialah langkah yang diambil sebagai kontrol di dalam perusahaan dengan menggunakan susunan dan proses yang sudah ditentukan contohnya struktur dewan komisaris independen, pertemuan bersama *board of director*, rapat umum pemegang saham, dan struktur dewan direksi. Sementara itu, mekanisme eksternal perusahaan contohnya susunan kepemilikan, pengelolaan oleh perusahaan, dan pengawasan pasar (Fadhilah, 2014). Penerapan GCG dapat diterapkan dengan dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

Menurut Murkana & Putra (2020) *tax avoidance* perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah aspek, salah satunya ialah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan suatu perusahaan dalam peningkatan laba dari setiap periode ke periode berikutnya. Penggunaan pengukuran *sales growth* dapat dijadikan prediksi besar laba yang akan diperoleh dengan seberapa besar pertumbuhan penjualannya.

Mengikuti pernyataan dari latar belakang, penelitian ini bermaksud guna melakukan pengujian apakah kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, dan *sales growth* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Kemudian, peneliti juga menambahkan variabel kontrol guna mendukung penelitian ini yakni profitabilitas dan ukuran perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang adanya interaksi antara agen dan prinsipal. Antara kedua pihak tersebut memiliki hubungan dalam mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menyampaikan adanya gambaran-gambaran atas keterikatan yang bisa terjadi antara agen dan prinsipal, ataupun prinsipal dengan prinsipal (Sutedi, 2012 hlm.14) Namun, dari kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan (*agency problem*) karena dari kepentingan *agent* dan *principal* terdapat pertentangan. Permasalahan yang timbul atas keterlibatan antara *principal* dan *agent* didasari karena pilihan resiko dan tujuan tidak sama (Eisenhardt, 1989).

Dalam penelitian, keterkaitan *tax avoidance* dengan teori agensi yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemungut pajak sebagai pihak prinsipal dan pembayar pajak yaitu manajemen selaku agen. Dimana, pihak *principal* sangat membutuhkan dana sebanyak-banyaknya yang bersumber dari pemungutan pajak untuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, pihak *agent* beranggapan harus mamksimalkan keuntungan yang dimiliki dan meminimalkan tanggungan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Adanya kepentingan yang berbeda antara pemungut pajak sebagai *principal* dan pembayar pajak selaku manajemen menimbulkan terjadinya konflik agensi.

Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris ialah pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk apapun baik keterkaitan afiliasi ataupun keterkaitan yang lainnya (Diantari & Ulupui, 2016). Dewan komisaris memiliki peran dalam penerapan GCG yang dijalankan di dalam perusahaan. Dewan komisaris dalam *agency theory* diharapkan memiliki keterkaitan diantara pihak prinsipal yakni yang mewakili pemilik perusahaan dalam melakukan pengawasan kepada manajemen secara efektif dan efisien. Dewan komisaris diharapkan mempunyai kemampuan guna memonitoring kegiatan direksi dalam perusahaan, sehingga diperlukannya pengetahuan dan kemampuan dalam bidang *financial* dan *accounting*. Dengan demikian, kompetensi dewan komisaris dapat memonitor kinerja perusahaan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakannya serta pengawasan yang ketat dapat memotivasi manajemen dalam mematuhi aturan perpajakan. Dan penyusunan laporan keuangan juga akan semakin berkualitas dan tidak mementingkan pihak

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

manapun. Hasil penelitian menurut Praptitorini (2018) bahwa efektivitas dewan komisaris memberikan dampak yang efektif untuk meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Sementara itu, menurut Astuti et al., (2020) keberadaan dewan komisaris di dalam perusahaan tetap memberikan pengaruh manajemen dalam melakukan tindakan oportunistik dengan cara melaksanakan *tax avoidance* pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini guna memaksimalkan keuntungan perusahaan demi mengurangi beban pajak yang telah ditetapkan.

H1: Kompetensi Dewan Komisaris memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit ialah sekelompok individu yang pembentukan serta pemberhentian dilakukan oleh dewan komisaris, dengan tujuan untuk mempermudah dewan komisaris dalam melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit yang memiliki fungsi monitoring dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan, bisa mengurangi perilaku kecurangan oleh manajemen perusahaan (Tandean, 2016).

Individu yang terdapat di dalam komite audit harus dilatar belakangi pada pendidikan dan kemampuan *financial* dan *accounting*. Apabila komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis dapat lebih paham untuk menjalankan fungsi serta perannya sebagai anggota komite audit dan mengerti mengenai aturan perpajakan dan dapat memberikan pertimbangan dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* (Marlinda et al., 2020; Praditasari dan Setiawan, 2017; Praptitorini, 2018). Sementara itu, menurut Tandean dan Winnie (2016) memaparkan semakin sedikit jumlah komite audit di dalam perusahaan maka semakin berkurangnya monitoring yang berada di perusahaan sehingga meningkatkan kegiatan oportunistik yang dilakukan manajemen dalam meminimalkan beban pajak penghasilannya.

H2: Kompetensi komite audit memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pada setiap perusahaan, diperlukan mempunyai pihak eksternal yang terdapat di dalam komponen perusahaan untuk meminimalisir terjadinya masalah keagenan diantara pihak agen yakni manajer sebagai pengelola perusahaan serta pihak principal yakni pemilik saham sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kepentingannya masing-masing (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan utama dalam pengawasan untuk memonitor kinerja perusahaan yang terdapat pada GCG. Artinya, kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan atas tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat oportunistik serta menjalankan kinerjanya secara efektif dan efisien untuk mencapai kemakmuran dan keinginan pemegang saham. Semakin meningkatnya kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin meningkatnya juga pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga mampu meminimalisir tindakan manajemen perusahaan guna tidak melaksanakan tindakan penghindaran pajak (Astuti et al., 2020; Marlinda et al., 2020; dan Praditasari dan Setiawan, 2017).

Kemudian, menurut Salsabila et al., (2021) memaparkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat menimbulkan adanya tekanan dari investor

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

institusional guna dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan melaksanakan kebijakan pajak agresif. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan investor institusional yang telah menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Yang mana, kecil maupun besar presentase kepemilikan institusional akan memberikan pengaruh untuk melaksanakan kebijakan pajak secara agresif.

H3: Kepemilikan institusional memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth dapat memaparkan kemajuan tingkat penjualan pada perusahaan. *Sales growth* dalam teori keagenan diharapkan memiliki keterkaitan diantara pihak agen dan pihak prinsipal sehingga pihak agen yang diberi wewenang oleh pihak prinsipal di dalam perusahaan ditugaskan untuk memperoleh dan mengelola keuntungannya yang dihasilkan dari penjualan. Apabila *sales growth* mengalami penurunan, maka terdapat masalah dalam peningkatan kapasitas operasi perusahaannya. Semakin meningkat volume penjualan dalam perusahaan, artinya *sales growth* juga bakal bertambah meningkat dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan juga bakal bertambah banyak. Keuntungan yang tinggi akan mengakibatkan besarnya tarif pajak yang wajib dilunasi oleh setiap perusahaan. Sehingga dengan adanya tarif pajak yang besar membuat perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak (Murkana dan Putra, 2020 dan Wahyuni et al., 2017).

Sementara itu, menurut Masrullah et al., (2018) dan Oktamawati (2017) pertumbuhan penjualan yang optimal pada perusahaan akan menyebabkan ukuran perusahaan yang semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan menyebabkan manajer dapat menjalankan kebijakannya secara baik dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan pengawasan perusahaan akan semakin lebih dipandang citranya oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga besarnya total aset yang dihasilkan oleh pertumbuhan penjualan akan cenderung untuk melakukan pemenuhan terhadap perpajakannya karna dianggap perusahaan tersebut mampu dalam memenuhi beban pajaknya.

H4: *Sales growth* memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian yang terdaftar di BEI periode 2015 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel memakai *purposive sampling*. Sampel yang dipilih berdasarkan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan *audited* periode 2015 hingga 2019 serta menyediakan informasi yang digunakan pada variabel dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan 129 perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen *tax avoidance* diprosikan dengan *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) yang diadopsi dari penelitian Desai dan Dharmapala (2009) dalam Darma et al., (2018). ABTD dapat digambarkan dengan rumus berikut:

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

$$BTD_{it} = \frac{PreTax\ Income - \left(\frac{Tax\ Expense}{Tax\ Rate\ it}\right)}{Total\ Asset_{i,t-1}}$$

Keterangan:

BTD_{it} : *Book Tax Difference*
Pretax Income : Laba Akuntansi
Tax Expense : Laba Fiskal Kini
 Total Asset_{i, It} : Total Aset Tahun Sebelumnya

Kemudian dilaksanakan perhitungan residual ats persamaan regresi total akrual terhadap BTD, sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_1 + Total\ Akrual_{it} + e_{it}$$

Dimana total akrual dihasilkan dengan rumus:

$$Total\ Akrual_{it} = \frac{NI - OCF_{it}}{Total\ Asset_{it}}$$

Keterangan:

BTD_{it} : *Book Tax Difference*
 NI_{it} : *Net Income*
 OCF_{it} : *Operation Cash Flow* Perusahaan i pada tahun t
 e_{it} : Error, yang juga sebagai nilai Abnormal BTD

Variabel Independen

Sementara itu, variabel independen yakni kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, *sales growth* serta profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol diukur menggunakan:

Tabel 2. Pengukuran Variabel Independen dan Kontrol

Variabel Independen dan Kontrol	Pengukuran
Kompetensi Dewan Komisaris	Kompetensi Dewan Komisaris $= \frac{\text{Jumlah dewan komisaris yang berlatar belakang akuntansi}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$
Kompetensi Komite Audit	Kompetensi Komite Audit $= \frac{\text{Anggota yang berlatar belakang Akuntansi}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$
Kepemilikan Institusional	$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

<i>Sales Growth</i>	Pertumbuhan Penjualan $= \frac{\text{Penjualan tahun } t - \text{penjualan tahun } t - 1}{\text{Penjualan tahun } t - 1}$
Profitabilitas	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilaksanakan agar dapat menampilkan gambaran secara terperinci terkait kondisi dari data penelitian yang dideskripsikan dari tiap-tiap variabel yang digunakan. Berikut hasil statistik deskriptif yang yang diolah menggunakan STATA v.16 berikut:

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ABTD_w	645	-0,0012087	0,0442359	-0,1410497	0,1213598
KDK	645	0,5282857	0,2932226	0	1
KKA	645	0,7638501	0,2578985	0	1
KI	645	0,6735011	0,2304379	0	0,9971122
SG_w	645	0,0445201	0,1842085	-0,4076026	0,5898064
ROA_w	645	0,0389668	0,082614	-0,15847	0,3002293
SIZE	645	28,43893	1,583002	23,96943	33,49453

Sumber: *Output STATA v.16*

Mengacu pada tabel di atas, maka informasi yang dapat dijabarkan ialah: (1) Nilai rata-rata dari *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sebesar -0,0012087 atau -0,12% yang bermakna bahwa indikasi perusahaan melaksanakan praktik tindakan *tax avoidance* masih tergolong rendah karena nilai rata-ratanya < 0 yang merujuk pada indikator penilaian *abnormal book tax difference*. Sedangkan untuk nilai terendah sebesar -0,1410497 atau -14,10% dan nilai tertinggi nilainya sebesar 0,1213598 atau 12,14%. (2) Kompetensi dewan komisaris yakni variabel independen yang proksikan dengan cara membandingkan anggota dewan komisaris yang mempunyai latar belakang akuntansi dan bisnis dibagi dengan seluruh dewan komisaris yang terdapat di dalam perusahaan menampilkan nilai rerata sebesar 0,5282857 dan standar deviasinya sebesar 0,2932226 yang dapat diartikan apabila rata-rata sampel perusahaan memiliki dewan komisaris yang berkompoten tinggi dengan presentase sebesar 52,83% sehingga mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, keuangan, dan bisnis. Selanjutnya, untuk komptensi tersendah sebesar 0% dan tertinggi sebesar 100%. (3) Kompetensi komite audit yang diproksikan dengan cara membandingkan anggota komite audit yang mempunyai latar belakang akuntansi dan bisnis dengan semua komite audit yang terdapat di perusahaan menghasilkan nilai rerata sebesar 0,7638501 dengan standar deviasinya sebesar 0,2578985. Dapat diartikan apabila perusahaan manufaktur pada periode tersebut

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

mempunyai nilai rata-rata komite audit yang berkompeten tinggi dengan presentase sebesar 76,38% sehingga mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, keuangan, dan bisnis. Kemudian untuk nilai terendahnya sebesar 0% dan nilai tertingginya sebesar 100%. (4) Kepemilikan institusional yang diprosikan dengan cara membandingkan antara jumlah saham institusi dengan jumlah saham beredar menampilkan nilai rerata sebesar 0,6735011 dan standar deviasinya sebesar 0,2304379. Dapat diartikan bahwa rerata perusahaan manufaktur di periode tersebut mempunyai nilai presentase kepemilikan saham institusi sebesar 67,35% dan terbilang tinggi sehingga pengawasan yang dilakukan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya untuk nilai minimumnya sebesar 0% dan nilai tertingginya sebesar 99,71%. (5) *Sales Growth* yang diprosikan dengan cara menghitung penjualan periode kini dikurang penjualan periode dahulu dibagi penjualan periode dahulu, membuktikan bahwa rerata pertumbuhan penjualan sebesar 0,0445201 dan standar deviasinya yakni 0,1842085. Dapat diartikan bahwa rerata perusahaan manufaktur mempunyai peningkatan penjualan sebesar 4,45%. Kemudian untuk nilai minimum *sales growth* sebesar -40,76% dan nilai maksimum sebesar 58,98%. (6) Profitabilitas merupakan variabel kontrol yang memakai proksi ROA dengan mengetahui keuntungan bersih dibagi dengan seluruh aset. Variabel ini memiliki nilai rerata yakni 0,0389668 dan standar deviasinya yakni 0,082614. Dapat diartikan bahwa rerata perusahaan manufaktur di periode tersebut mempunyai kenaikan tingkat laba bersih sebesar 3,89%. Selanjutnya untuk nilai minimum profitabilitas sebesar -15,84% dan nilai maksimumnya sebesar 30,02%. (7) Ukuran Perusahaan yang menjadi variabel kontrol memakai proksi nilai logaritma natural total aset perusahaan yang menampilkan nilai rerata sebesar 28,43893 dan standar deviasinya sebesar 1,583002 yang dapat dikatakan apabila rata-rata sampel perusahaan memiliki nilai aset yang tinggi sehingga dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang besar. Kemudian untuk nilai terendah sebesar 23,96943 dan nilai tertingginya sebesar 33,49453.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-sq:		
Within	=	0,3623
Between	=	0,1168
Overall	=	0,1708

Sumber: *Output STATA v.16*

Berdasarkan data pada tabel 6, terdapat nilai R^2 memiliki nilai 0,1708. Hal ini berarti pengaruh kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, *sales growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sebesar 17,08%, dan sisanya berasal dari faktor lain diluar variabel independen dan kontrol.

Tabel 5. Hasil Regresi pada *Fixed Effect Model*

ABTD_w	Coef.	Std.Err.	t	P> t	Kesimpulan
KDK	-0,0063269	0,0117048	-0,54	0,589	H ₁ : ditolak

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

KKA	0,0131813	0,0144975	0,91	0,364	H ₂ : ditolak
KI	-0,0109003	0,0136367	-0,80	0,424	H ₃ : ditolak
SG_w	-0,0204187	0,0078575	-2,60	0,010*	H ₄ : diterima
ROA_w	0,5138826	0,0313161	16,41	0,000*	Diterima
SIZE	-0,0109897	0,0055724	-1,97	0,049*	Diterima
_cons	0,2928254	0,1588943	1,184	0,066	

Standar signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dan *t* tabel sebesar 1,960

Sumber: Output STATA v.16

Setelah dilakukan pengujian estimasi data panel yakni dengan uji chow dan uji hausman, maka pengujian yang paling layak digunakan oleh penelitian ini yaitu *fixed effect model*. Untuk menentukan adanya pengaruh dari tiap-tiap dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang bermakna bahwa jika $P < 0,05$ maka H₀ diterima, dan sebaliknya H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar *agency theory* diharapkan memiliki keterkaitan diantara dewan komisaris sebagai pihak prinsipal yakni yang mewakili pemilik perusahaan dalam melakukan pengawasan kepada manajemen selaku agen secara efektif dan efisien. Kompetensi dewan komisaris dapat diartikan sebagai kemampuan anggota dewan komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, keuangan, dan bisnis sehingga diharapkan dapat lebih menguasai laporan keuangan dan dapat memonitor kinerja perusahaan secara optimal.

Berdasar hasil uji parsial pada Tabel 5, dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dinyatakan pada nilai t_{hitung} yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yakni $(-0,54 < 1,960)$ dan untuk nilai signifikansi uji variabel lebih tinggi sebesar $(0,589 > 0,05)$. Dari hasil tersebut, artinya H₁ pada penelitian ini ditolak dan dapat dikatakan kompetensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari output data penelitian membuktikan bahwa tingkat kompetensi dewan komisaris yang tinggi oleh perusahaan ALKA pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.00. Namun, tingkat *tax avoidance* yang dihasilkan sebesar 0,12136. Selain itu, kompetensi dewan komisaris yang rendah oleh perusahaan IIKP pada tahun 2015 yakni sebesar 0.00 dan memiliki tingkat *tax avoidance* sebesar -0,03589. Sehingga dari data tersebut dapat diartikan apabila kompetensi dewan komisaris dan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh. Maka dapat dibuktikan bahwa pembentukan dewan komisaris yang hanya mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis kurang efektif dalam melaksanakan monitoring atas kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut membuat kinerja yang dilakukan oleh dewan komisaris masih kurang efisien sehingga tidak dapat meminimalkan praktik tindakan penghindaran pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Praditasari & Setiawan (2017) dan Marlinda et al., (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Yang mana, pada penelitian tersebut

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

mengatakan dewan komisaris sebagai fungsi pengawasan tidak dapat mengawasi kinerja secara optimal, sehingga tidak dapat memotivasi manajemen dalam mematuhi aturan perpajakan dan meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar teori keagenan dimana pihak prinsipal yang memberikan kewenangan kepada manajer selaku pihak yang memonitoring perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik serta optimal dan juga tetap memperhatikan kepentingan dari *principal*. Komite audit yang memiliki fungsi dalam pengelolaan perusahaan serta mengawasi laporan keuangan perusahaan dapat meminimalisir perilaku kecurangan oleh manajemen perusahaan. Komite audit diharapkan mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis yang biasa disebut dengan kompetensi komite audit.

Berdasar hasil uji parsial pada Tabel 5, dapat diartikan variabel kompetensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dinyatakan pada nilai t_{hitung} yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yakni $(0,91 < 1,960)$ dan untuk nilai signifikansi uji variabel lebih tinggi sebesar $(0,364 > 0,05)$. Dari hasil tersebut, artinya H_2 pada penelitian ini ditolak dan dapat dikatakan kompetensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari output data membuktikan bahwa tingkat kompetensi komite audit yang tinggi oleh perusahaan FASW pada tahun 2016 yaitu sebesar 1.00 dan memiliki tingkat *tax avoidance* yang tinggi juga yaitu sebesar 0,12136. Selain itu, kompetensi komite audit yang rendah oleh perusahaan YPAS pada tahun 2016 yakni 0.00 dan tingkat *tax avoidance* sebesar -0,04321. Sehingga dari data tersebut dapat diartikan apabila kompetensi komite audit dan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh. Maka dapat dibuktikan bahwa komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnis kurang mempunyai peran yang efisien dan efektif dalam meminimalisir perilaku penyelewengan yang dilaksanakan pada manajemen perusahaan. Sehingga tidak dapat memastikan kebijakan yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan berjalan dengan baik dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Zheng et al., (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi atau keahlian komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan komite audit yang dijadikan sebagai instrumen dalam menjalankan fungsi dalam memonitoring kebijakan perusahaan tidak dapat memberikan pertimbangan serta pengaruh dalam melaksanakan praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berkaitan dengan *agency theory* yang disampaikan oleh Jensen & Meckling (1976) kepemilikan institusional dikatakan mampu meningkatkan pengawasan atas tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat oportunistik. Semakin meningkatnya kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin meningkatnya juga pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak agen yakni manajemen perusahaan yang tidak seharusnya dilakukan karena tidak sesuai dengan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

kepentingan pihak principal. Dengan begitu, timbul konflik kepentingan diantara pihak agen dengan pihak principal. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena manajemen melakukan tindakan oportunistik yang berdampak negatif terhadap perusahaan yakni dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasar hasil uji parsial pada Tabel 5, dapat diartikan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dinyatakan pada nilai t_{hitung} yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yakni $(-0,80 < 1,960)$ dan untuk nilai signifikansi uji variabel lebih tinggi sebesar $(0,424 > 0,05)$, Dari hasil tersebut, artinya H_3 pada penelitian ini ditolak dan dapat dikatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari output data penelitian membuktikan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi oleh perusahaan FASW pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,9971122 dan memiliki tingkat *tax avoidance* sebesar 0,00811. Selain itu, kepemilikan institusional yang rendah oleh perusahaan BAJA pada tahun 2018 yakni sebesar 0.00 dan memiliki tingkat *tax avoidance* sebesar -0,05693. Sehingga dari data tersebut kepemilikan institusional dan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh. Maka dapat dibuktikan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan saham yang dipunyai institusi maka tidak berpengaruh atas perusahaan melaksanakan praktik tindakan *tax avoidance*. Hal ini juga dikarenakan apabila didalam perusahaan menginginkan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam mendapatkan laba perusahaan, maka semua aktivitas yang akan merugikan perusahaan termasuk dalam penghindaran pajak akan dilaksanakan. Apabila aktivitas tersebut dapat menguntungkan bagi pihak institusional, maka pihak institusional tersebut juga akan mendukung kegiatan tersebut. Sehingga kecil maupun besar proporsi kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Banyak atau dikitnya jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan tidak berpengaruh pada praktik tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut diduga karena kepemilikan institusional belum mampu ikut serta dalam melaksanakan monitoring, pendisiplinan, dan mempengaruhi praktik oportunistik yang dilakukan oleh majemen dalam penghindaran pajak. Dengan begitu, hal tersebut dapat memperkuat bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Masrullah et al., (2018) dan Ashari et al., (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional belum tentu mampu merekomendasikan pengaruh yang benar akan sikap oportunistik yang dilaksanakan pada manajemen.

Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Berdasar *agency theory* dapat dikatakan bahwa pihak agen yang diberikan wewenang oleh pihak principal untuk mengelola keuntungan yang dihasilkan dari penjualan. Pihak agen melakukan upaya untuk menghasilkan peningkatan keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari penjualan tersebut. *Sales growth* dapat memperlihatkan sejauh mana perusahaan bisa melakukan peningkatan penjualan dengan melihat total penjualan secara menyeluruh. *Sales growth* yang baik bakal menghasilkan ukuran perusahaan yang meningkat pula, yang mana apabila

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

perusahaan mempunyai ukuran yang besar bakal menghasilkan total aset yang semakin meningkat.

Berdasar hasil uji parsial pada Tabel 5, dapat dikatakan bahwa variabel *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dinyatakan pada nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yakni $(-2,60 > 1,960)$ dan untuk nilai signifikansi uji variabel lebih rendah sebesar $(0,010 < 0,05)$. Dari hasil tersebut, artinya H_4 pada penelitian ini diterima dan dapat dikatakan *sales growth* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan output data membuktikan bahwa tingkat *sales growth* yang tinggi oleh perusahaan ETWA pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,58981 dan memiliki tingkat *tax avoidance* sebesar -0,07451. Selain itu, *sales growth* yang rendah oleh perusahaan HDTX pada tahun 2018 yakni sebesar -0,40760 dan memiliki tingkat *tax avoidance* sebesar 0,12136. Sehingga dari data tersebut *sales growth* dan *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif signifikan. Maka dapat dibuktikan bahwa perusahaan dengan *sales growth* yang meningkat akan membuat ukuran perusahaannya juga akan semakin besar yang dihasilkan dari total aset. Dengan besarnya ukuran perusahaan akan menyebabkan perusahaan tetap menjaga citra nama baik dimata pemerintah dan masyarakat sehingga untuk mempertahankan persaingan bisnis yang ada, perusahaan memilih untuk tidak melaksanakan praktik tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya akan lebih patuh dalam melaksanakan aturan perpajakannya, karena perusahaan yang mengalami peningkatan dalam penjumlahannya akan semakin meningkat juga laba yang diperoleh. Laba yang semakin meningkat, akan membuat perusahaan lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajaknya. Hal ini karena perusahaan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembayaran pajaknya yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan, sehingga terhindar dari praktik tindakan *tax avoidance*.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Masrullah et al., (2018) dan Oktamawati (2017) yang menemukan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan *sales growth* yang dapat mempresentasikan kesuksesan investasi dari periode dahulu serta bisa dijadikan perkiraan pertumbuhan pada masa kemudian memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

SIMPULAN

Sasaran awal penelitian yakni untuk menguji apakah kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, dan *sales growth* memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Informasi yang dipergunakan sebagai sumber penelitian yakni data sekunder yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 yang diolah menggunakan STATA v.16.

Mengacu pada hasil pengujian yang sudah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Namun untuk variabel *sales growth* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, untuk variabel kontrol yakni profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

Adapula keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini yakni mengingat kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami pandemi, peneliti kesulitan untuk melakukan observasi langsung ke perusahaan yang dijadikan sampel untuk mendapatkan laporan tahunan serta keuangan yang tidak dipublikasikan. Sehingga untuk beberapa perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan serta keuangannya secara menyeluruh dari periode 2015-2019 tidak dapat dijadikan sampel penelitian karena tidak mencakup syarat yang telah ditunjukkan.

Dari keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, untuk itu adapun saran yang dapat diterapkan ialah akibat adanya perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan serta tahunan perusahaan secara menyeluruh. Maka, saran peneliti yakni untuk menerbitkan laporan keuangan serta tahunan perusahaannya secara menyeluruh melalui website perusahaan agar bisa mendukung proses penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dianjurkan menggunakan variabel independen yang lainnya dan variabel lain dari *corporate governance* yang dapat memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Serta untuk pengukuran *tax avoidance* diharapkan tidak hanya menggunakan satu proksi saja, melainkan lebih dari satu proksi yang digunakan.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. B., Prima, B., & Qolbi, N. (2019). *TJN Menuding BAT Rancang Skema untuk Penghindaran Pajak di Indonesia*. Kontan.Co.Id.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Maspirah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment. *HBS Finance Working Paper*, 62(1), 169–186. <https://doi.org/10.17310/ntj.2009.1.08>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3(4), 305–360.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39–47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *SIMAK : Jurnal Sistem*

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi, 16(2), 142–165.

- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13.01.004>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI*.
- Pohan, & Anwar, C. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.
- Praptitorini, M. D. (2018). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 9(1), 66–77.
- Primadhyta, S. (2017). *OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal*. CNNIndonesia.Com.
- Salsabila, A. H., Arieftiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 65–84. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6574>
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance* (ke-1). Sinar Grafika.
- Tandean, V. A. (2016). Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 54–62. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p07>
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal. 396 – 412

Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2017). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66–80.

Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2019). *Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness?* Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_102